



**Pemerintah
Kabupaten Lamongan**

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib membuat Renja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, untuk periode waktu selama satu tahunan, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis PD untuk periode waktu selama lima tahunan. Didalam Perubahan Renja memuat secara terperinci terhadap rencana perubahan Program dan Kegiatan PD selama satu tahun anggaran. Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2025, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi agar dapat terlaksana dengan baik.

Lamongan,

2025



Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan

Drs. Shodikin, M.Pd.

Penanda Utama Muda

NIP. 19661019 198703 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan	4
1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan Renja	4
BAB II EVALUASI RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025	6
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra BKPSDM	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM	18
2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi	23
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2025	24
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025	25
BAB IV PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	36
4.3. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	38
4.4. Rencana Tindak Lanjut	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Lamongan	16
Tabel 2.3	Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Perangkat Daerah membutuhkan perencanaan kerja yang sistematis untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Rencana kerja (Renja) ini berfungsi sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, serta sebagai alat evaluasi dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinamisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang tak bisa dipungkiri berperan besar dan perlu diperhatikan di dalam perancangan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi dan asumsi pembangunan pada RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 yang ditetapkan, maka Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian dan beberapa pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang harus dituangkan kembali dalam mekanisme Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025,

Demikian juga agar pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan lancar, maka setelah dilakukan evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 perlu untuk mengusulkan perubahan anggaran, karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran kode rekening belanja baik di dalam satu kegiatan maupun antar kegiatan lainnya, hal ini disebabkan karena adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan penyesuaian kode rekening belanja.
- b. Kegiatan yang setelah dievaluasi membutuhkan pengurangan maupun penambahan anggaran karena menyesuaikan dengan kebutuhan real kegiatan dengan pertimbangan prioritas kegiatan dan efisiensi anggaran.
- c. Adanya kebijakan kegiatan yang pelaksanaannya menyesuaikan instruksi dari Pemerintah Pusat sehingga kebutuhan anggaran dan jadwal pelaksanaan kegiatan juga menyesuaikan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Untuk itu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perlu menyusun Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan operasional dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Kepegawaian diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lsmongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan;

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dimaksudkan agar tersedia dokumen perubahan perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran dan target kinerjanya yang secara terperinci dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Lamongan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025, serta sebagai dasar penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;
- 2) Instrumen yang berfungsi mengontrol keselarasan dan konsistensi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 3) Sebagai petunjuk operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

Sistematika Rancangan Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra BKPSDM

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

3.1. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2025

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- d. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA BKPSDM SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025, bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap target kinerja yang direncanakan dalam Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra BKPSDM

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2025.

Pada tahun 2025 total anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan sebesar Rp.9.554.529.100,28, yang terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan, dengan rincian anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 6.548.575.500,28, Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp.678.704.200,00 dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp.2.327.249.400,00.

Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 1.704.173.981,00 atau 17,84%, dengan rincian anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp.1.664.590.081,00 atau 25,42%, Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp.39.583.900,00 atau 5,83% dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

Sedangkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dari Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator “Nilai IKM” dan target tahun 2025 sebesar 89,18, sampai dengan triwulan I tahun 2025 realisasi belum rilis dikarenakan jadwal pelaksanaan survei IKM dilaksanakan pada triwulan III tahun 2025.
- 2) Program Kepegawaian Daerah, dengan indikator “Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN” dan target tahun 2025 sebesar 87,90, sampai dengan triwulan I tahun 2025 proses pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN dalam tahap penilaian, sehingga hasil penilaian belum rilis.
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan indikator “Nilai Dimensi Kompetensi ASN” dan target tahun 2025 sebesar 28,44, dari data monev melalui aplikasi SIASN BKN periode Maret 2025 terealisasi sebesar 26,67 atau 93,77%.

Sementara itu untuk realisasi kinerja kegiatan rata-rata telah tercapai sesuai target di triwulan I, namun ada beberapa kegiatan yang masih belum mencapai target, diantaranya yaitu:

- 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator “Persentase layanan administrasi umum yang tercukupi dengan baik”, dari target 100% terealisasi sebesar 1,34%;
- 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator “Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi dalam tahun berjalan”, dari target 100% belum terealisasi dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan pada triwulan II tahun 2025;
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik, dari target 85% terealisasi sebesar 16,53%;
- 4) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan indikator “Persentase ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan nilai post test baik”, dari target 79% belum

teralisasi karena penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis akan dilaksanakan di triwulan II tahun 2025;

- 5) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan indikator “Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/keahlian”, dari target 2.241 ASN terealisasi sebesar 140 ASN. Hal ini dikarenakan proses pengiriman pelatihan kepemimpinan, dasar dan pelatihan lainnya akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

No.	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s/d Triwulan I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	5	03					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5	03			KEPEGAWAIAN																BKPSDM	
	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	83.75	6,318,824,347.00	89.18	5,873,270,069	89.18	6,548,575,500	0	1,664,590,081	0.00%	25.42%	89.18	7,537,860,150	106.48%	119.29%	BKPSDM	
	5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu	100%	26,141,958.60	100%	29,924,800	100%	25,000,000	37.04%	3,206,800	37.04%	12.83%	1.3704	33,131,600	137.04%	126.74%	BKPSDM	
	5	03	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	10,456,783.60	4	9,956,050	7	7,880,000	3	1,002,300	42.86%	12.72%	7	10,958,350	100.00%	104.80%	BKPSDM	
	5	03	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	15,685,175.00	12	19,968,750	20	17,120,000	7	2,204,500	35.00%	12.88%	19	22,173,250	95.00%	141.36%	BKPSDM	
	5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	5,558,919,415.63	97%	5,313,912,169	100%	5,997,018,660	60.28%	1,569,972,994	60.28%	26.18%	157%	6,883,885,163	157.28%	123.83%	BKPSDM	
	5	03	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	5,532,777,456.63	42	5,294,168,669	45	5,978,768,660	43	1,566,510,194	95.56%	26.20%	45	6,860,678,863	100.00%	124.00%	BKPSDM	
	5	03	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	10,456,784.00	3	7,351,950	3	7,500,000	1	2,084,800	33.33%	27.80%	4	9,436,750	133.33%	90.25%	BKPSDM	
	5	03	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	15,685,175.00	13	12,391,550	13	10,750,000	3	1,378,000	23.08%	12.82%	16	13,769,550	123.08%	87.79%	BKPSDM	
	5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan baik	100%	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	BKPSDM	
	5	03	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tercukupi dengan baik	100%	181,846,151.43	99.37%	111,527,973	100.00%	108,326,600	1.34%	5,759,300	1.34%	5.32%	100.71%	117,287,273	100.71%	64.50%	BKPSDM	

No.	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s/d Tribulan I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5	03	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34	3,090,675.00	34	2,500,000	62	2,500,000	23	977,300	37.10%	39.09%	57	3,477,300	167.65%	112.51%	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah alat-alat rumah tangga yang tersedia	399	10,000,000.00	331	9,853,900	269	10,000,000	12	1,332,000	4.46%	13.32%	343	11,185,900	85.96%	111.86%	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	648	25,525,000.00	648	24,963,100	769	23,519,400	20	200,000	2.60%	0.85%	668	25,163,100	103.09%	98.58%	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,888	24,132,601.43	2824	10,141,000	3782	4,866,000	0	-	0.00%	0.00%	2824	10,141,000	72.63%	42.02%	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	78	10,302,250.00	66	15,895,000	78	19,549,000	12	3,250,000	15.38%	16.62%	78	19,145,000	100.00%	185.83%	BKPSDM	
	5	03	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	108,795,625.00	39	48,174,973	30	47,892,200	0	-	0.00%	0.00%	39	48,174,973	97.50%	44.28%	BKPSDM	
	5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi dalam tahun berjalan	100%	20,000,000.00	100.00%	29,500,000	100.00%	17,942,200	0.00%	-	0.00%	0.00%	100%	29,500,000	100.00%	147.50%	BKPSDM	
	5	03	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.00	20,000,000.00	2	29,500,000	1	17,942,200	0	-	0.00%	0.00%	2	29,500,000	100.00%	147.50%	BKPSDM	
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	386,597,752.78	100.00%	319,452,220	100.00%	280,422,000	25.00%	79,571,082	25.00%	28.38%	125%	399,023,302	125.00%	103.21%	BKPSDM	
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1,545,337.50	12	1,500,000	0	-	0	-	0.00%	0.00%	12	1,500,000	100.00%	97.07%	BKPSDM	
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	6,274,070.76	12	8,834,328	12	10,000,000	3	795,582	25.00%	7.96%	12	9,629,910	100.00%	153.49%	BKPSDM	
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	378,778,344.53	12	309,117,892	12	270,422,000	3	78,775,500	25.00%	29.13%	12	387,893,392	100.00%	102.41%	BKPSDM	
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	109.53%	110,319,068.56	93.10%	69,952,907	85.00%	119,866,040	16.53%	6,079,905	19.45%	5.07%	109.63%	76,032,812	100.09%	68.92%	BKPSDM	

No.	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s/d Tribunal I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5	03	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,964,170.13	1	31,210,085	1	36,430,500	0.25	4,279,905	25.00%	11.75%	1	35,489,990	100.00%	78.93%	BKPSDM	
	5	03	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	54,898,114.69	15	28,902,822	16	33,515,540	1.71	1,800,000	10.69%	5.37%	15	30,702,822	93.75%	55.93%	BKPSDM	
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	10,456,783.75	11	9,840,000	12	9,920,000	3	-	25.00%	0.00%	14	9,840,000	53.85%	94.10%	BKPSDM	
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	0	-	1	40,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0	-	-	-	BKPSDM	
	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	81.00	1,298,145,350.00	99.49%	630,379,079	87.90%	678,704,200	0.00%	39,583,900	0.00%	5.83%	99.49%	669,962,979	1.23%	51.61%	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data ASN yang valid	100%	387,426,450.00	99.20%	349,244,350	100.00%	262,808,000	88.19%	3,247,000	88.19%	1.24%	187.38%	352,491,350	187.38%	90.98%	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	26,141,959.38	1	9,756,500	1	4,700,000	0	-	0.00%	0.00%	1	9,756,500	100.00%	37.32%	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	146,394,972.50	3	309,564,100	3	182,943,000	1	-	33.33%	0.00%	4	309,564,100	133.33%	211.46%	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	2	31,895,802.50	2	9,996,000	2	8,550,000	0	-	0.00%	0.00%	2	9,996,000	100.00%	31.34%	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	73	26,141,959.38	72	9,998,950	73	10,000,000	5	2,610,000	6.85%	26.10%	72	12,608,950	98.63%	48.23%	BKPSDM	
	5	03	02	2.01	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	156,851,756.25	12	9,928,800	12	56,615,000	3	637,000	25.00%	1.13%	12	10,565,800	100.00%	6.74%	BKPSDM	
	5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi jabatan	87%	627,407,025.00	86.70%	216,215,606	86.50%	296,083,200	86.50%	34,165,700	100.00%	11.54%	86.70%	250,381,306	99.66%	39.91%	BKPSDM	

No.	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s/d Tribulan I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5	03	02	2.02	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	52,283,918.75	4	30,681,000	4	18,934,700	1	1,896,800	25.00%	10.02%	4	32,577,800	100.00%	62.31%	BKPSDM	
	5	03	02	2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6	52,283,918.75	6	9,999,100	6	16,750,000	2	2,848,700	33.33%	17.01%	6	12,847,800	100.00%	24.57%	BKPSDM	
	5	03	02	2.02	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	522,839,187.50	4	175,535,506	4	260,398,500	1	29,420,200	25.00%	11.30%	4	204,955,706	100.00%	39.20%	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang terfasilitasi dalam jabatan fungsional	100%	51,511,250.00	184.00%	25,000,000	100.00%	27,663,000	46.67%	-	46.67%	0.00%	184.00%	25,000,000	184.00%	48.53%	BKPSDM	
	5	03	02	2.03	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300	51,511,250.00	460	25,000,000	300	27,663,000	140	-	46.67%	0.00%	460	25,000,000	153.33%	48.53%	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang prestasi kerjanya baik	99%	231,800,625.00	99.98%	39,919,123	98.00%	92,150,000	95.00%	2,171,200	96.94%	2.36%	99.98%	42,090,323	100.99%	18.16%	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	154,533,750.00	2	9,997,232	4	48,650,000	1	-	25.00%	0.00%	2	9,997,232	50.00%	6.47%	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	65	25,755,625.00	98	9,961,891	65	10,000,000	0	-	0.00%	0.00%	98	9,961,891	150.77%	38.68%	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	75	25,755,625.00	75	9,960,000	74	23,500,000	24	2,171,200	32.43%	9.24%	75	12,131,200	100.00%	47.10%	BKPSDM	
	5	03	02	2.04	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	4	25,755,625.00	4	10,000,000	4	10,000,000	1	-	25.00%	0.00%	4	10,000,000	100.00%	38.83%	BKPSDM	
	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	30.44	2,793,868,423.00	27.60	674,659,900	28.44	2,327,249,400	26.67	-	93.78%	0.00%	27.60	674,659,900	90.67%	24.15%	BKPSDM	
	5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan nilai post test baik	80%	54,189,835.00	80.00%	314,519,900	79.00%	450,000,000	0.00%	-	0.00%	0.00%	80.00%	314,519,900	100.00%	580.40%	BKPSDM	
	5	04	02	2.01	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160	54,189,835.00	110	314,519,900	160	450,000,000	0	-	0.00%	0.00%	110	314,519,900	68.75%	580.40%	BKPSDM	

No.	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Renstra pada Akhir Periode 2021-2025		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s/d Tribunal I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
	5	04	02	2.02			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikasi kompetensi / keahlian	2.243	2.739.678.588,00	138	360.140.000	2241	1.877.249.400	140	-	6,25%	0,00%	138	360.140.000	6,15%	13,15%	BKPSDM	
	5	04	02	2.02	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	4	535.073.109,00	2	14.960.000	4	115.000.000	1	-	25,00%	0,00%	2	14.960.000	50,00%	2,80%	BKPSDM	
	5	04	02	2.02	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	2.204.605.479,00	2	345.180.000	4	1.762.249.400	1	-	25,00%	0,00%	2	345.180.000	50,00%	15,66%	BKPSDM	



Lamongan, 2025
Kepala Bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan
Drs. Sh. d. S., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651019 198703 1 008

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BKPSDM Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan BKPSDM yaitu “Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah”, dengan indikator “Indeks Profesionalitas ASN”, target tahun 2025 ini sebesar 72.
2. Sasaran Strategis BKPSDM yaitu:
 - a) Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Daerah, dengan indikator “Indeks Sistem Merit”, target tahun 2025 ini sebesar 300.
 - b) Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah, dengan indikator “Nilai SAKIP BKPSDM”, target tahun 2025 ini sebesar 89,65.

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi ukuran kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Lamongan, sehingga pencapaian kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun pencapaian kinerja selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan “Indeks Profesionalitas ASN”

Realisasi capaian pada indikator tujuan ini, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 selalu melebihi target yang ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 serta menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan sebesar 18,65 yaitu dari angka 60,63 menjadi 79,28. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan profesionalitas ASN Pemerintah Daerah sangat baik. Sementara itu hasil Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 belum rilis dikarenakan masih dalam proses pengukuran oleh BKN.

2. Indikator Kinerja Utama, terdiri dari:

a. Indeks Sistem Merit

Realisasi capaian Indeks Sistem Merit dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2022 sebesar 278 sampai dengan tahun 2024 sebesar 306,5, hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi manajemen ASN Pemerintah Daerah berdasarkan Sistem Merit sudah baik.

b. Nilai SAKIP BKPSDM

Realisasi capaian Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Lamongan juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan telah melebihi target yang

telah ditetapkan pada Renstra, BKPSDM Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Realisasi Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 yaitu sebesar 89,75 menjadi 90,18 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di BKPSDM Kabupaten Lamongan sudah sangat baik.

Adapun faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja pelayanan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Lamongan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan											
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	65	68	71	72	79.28	Belum rilis	72	74	Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Permenpan No. 38 Tahun 2018. IP-ASN = Dimensi Kualifikasi (nilai bobot 25%) + Dimensi Kompetensi (nilai bobot 40%) + Dimensi Kinerja (nilai bobot 30%) + Dimensi (nilai bobot 5%) Penetapan IP-ASN tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh BKN, namun penetapan IP-ASN tahun 2023 sebesar 79.28 sesuai surat Kepala BKN Nomor: 398/B-AK.04/SD/KR.II/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Hasil Pengukuran IP ASN tahun 2023 Instansi di Wilayah Kerja Kanreg II BKN Surabaya.
	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
1	Indeks Sistem Merit	-	-	260	265	275	300	295	306.5	300	324	Penilaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2022 sampai dengan 2023 dilaksanakan oleh KASN, namun sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 04 tahun 2024 tentang Pengalihan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, penetapan Indeks Sistem Merit tahun 2024 beralih ke BKN. Berdasarkan surat Kepala BKN Nomor 518 tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemkab. Lamongan, hasil penetapan Indeks Sistem Merit tahun 2024 yaitu sebesar 306,5.

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Nilai SAKIP BKPSDM	-	-	89,50	89,55	89,60	89,65	89,96	90,18	90,18	90,18	Hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja BKPSDM tahun 2024 sebesar 90,18 sesuai surat Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor: 700.1.2.1/41.1/LHP/413.201/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi BKPSDM Kabupaten Lamongan.

Lamongan, 2025



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan

Lrs. Shodikin, M.Pd.
Pegawai Utama Muda
NIP. 19661019 198703 1 008

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses peningkatan kualitas sumber daya aparatur untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sumber daya aparatur, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan sumber daya aparatur karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih merata untuk seluruh penduduk dan daya saing bangsa dalam setiap aspek pembangunan. Pada sektor tata kelola urusan pemerintahan masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang berkualitas yang meliputi:

- Belum terimplementasinya manajemen talenta, dampaknya: Suksesi pengisian jabatan terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, kuatnya mentalitas silo, dan rendahnya budaya dan etos kerja;
- Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, hal ini berdampak pada disparitas/ kesenjangan penghasilan ASN menyebabkan sulit mempertahankan talenta ASN terbaik;
- ASN rentan terhadap intervensi politik;
- Belum meratanya kualitas pelayanan publik;
- Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah;
- Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata;

- Digitalisasi pemerintahan juga menghadapi tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

Untuk melakukan perubahan secara menyeluruh diperlukan langkah-langkah perbaikan tata kelola guna menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas aparatur daerah. Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isu Strategis SDM Aparatur memiliki Agenda prioritas sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu:

- a. Regulasi;
- b. Kelembagaan yang efektif;
- c. Proses bisnis yang adaptif;
- d. Manajemen talenta;**
- e. Meritokrasi dan integritas;**
- f. Manajemen ASN Strategis;**
- g. Pelayanan publik yang berkualitas;
- h. Pelayanan bidang strategis;
- i. Digitalisasi;
- j. Kaderisasi dan pendanaan partai politik, dan
- k. Relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Sedangkan Isu-isu penting dalam melaksanakan manajemen kepegawaian di Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Renstra BKPSM Kabupaten Lamongan 2021-2026 adalah:

- a) Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN.
- b) Impelementasi manajemen talenta PNS.
- c) Penguatan implementasi sistem manajemen kinerja.
- d) Penguatan implementasi reward dan punishment ASN.
- e) Peningkatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur.
- f) Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi.

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM Aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Lamongan yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan data ASN tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai ASN sejumlah 14.081 orang, yang terdiri dari 5.926 laki-laki atau 42,09% dan 8.155 perempuan atau 57,91%. Jumlah ASN ditinjau dari jabatan, yaitu Jumlah jabatan Struktural sebanyak 615 orang (JPT 33 orang, Administrator 215 orang, Pengawas 367 orang), jabatan Fungsional sebanyak 11.044 orang atau 78,43%, dan pelaksana sebanyak 2.422 orang. Pejabat struktural yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan hanya sejumlah 99 orang atau 16,23% yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 15 orang, Pejabat Administrator sebanyak 51 orang dan Pejabat Pengawas 33 orang. Sedangkan pejabat struktural yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan sejumlah 511 orang atau 83,77%.

Adapun Isu-isu penting dalam melaksanakan manajemen kepegawaian di Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Lamongan 2021-2026 adalah:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN.
- b. Impelementasi manajemen talenta PNS.
- c. Penguatan implementasi sistem manajemen kinerja.
- d. Penguatan implementasi reward dan punishment ASN.
- e. Peningkatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur.
- f. Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas membantu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Lamongan Tahun 2025, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan sebagai pelayanan aparatur, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat lainnya. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dijelaskan sebagaimana pada Tabel 2.3 Usulan perubahan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

Lamongan,

2025

**Ketala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan**



Dra. Sholikin, M.Pd.

Kepala Utama Muda

NIP. 19661019 198703 1 008

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yang salah satunya yaitu sumber daya aparatur SDM yang diharapkan menghasilkan apatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Dalam *grand design* reformasi birokrasi nasional tahun 2010-2025 berdasarkan Kepres No. 81 Tahun 2010, terdapat beberapa permasalahan utama dibidang SDM Aparatur yaitu alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Selain itu, sistem penggajian pegawai negeri belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/ pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja dan tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan.

Sedangkan pada periode/ sasaran lima tahun ketiga (2020-2024) yaitu reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua.

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Oleh karena itu hasil yang diharapkan dari perubahan tersebut yakni 1) Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, 2) Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit, 3) Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur 4) Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya, 5) Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya, 6) Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan, 7) Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDM aparatur, 8) Meningkatnya profesionalisme aparatur.

3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2025

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 5 “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Responsif”. Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui

pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi V, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi V RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah” dengan indikator “Indeks Profesionalitas Aparatur”.

Sehingga tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah”. Indikator: Indeks Profesionalitas ASN, dengan target pada tahun 2025 ini sebesar 72.

Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur maka sasaran yang ditetapkan di tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Daerah.
Indikator Indeks Sistem Merit, dengan target sebesar 300.
2. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah.
Indikator Nilai SAKIP BKPSDM, dengan target sebesar 89,65.

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025

Pada tahun 2025 total anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan sebelum perubahan sebesar Rp. 9.554.529.100,28, dan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 1.704.173.981,00 atau 17,83%, dengan rincian realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp. 1.664.590.081,00 atau 25,42%, Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp. 39.583.900,00 atau 5,83% dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Lamongan Tahun 2025 antara lain terkait dengan pencapaian visi dan misi dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 serta adanya kebijakan manajemen ASN dari Pemerintah Pusat.

Adapun perubahan anggaran meliputi perubahan target capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan dan pagu anggaran yang membutuhkan penambahan anggaran atau mengalami pergeseran antar kode rekening belanja dalam satu kegiatan ataupun antar kegiatan dan sub kegiatan serta pengurangan pagu anggaran kegiatan karena beberapa kebijakan atau kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut:

a) Kegiatan/ Sub Kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran

1. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pada **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, mengalami kenaikan anggaran yang semula sebesar **Rp.48.650.000,00** menjadi **Rp.98.650.000,00**. Kenaikan anggaran ini digunakan untuk Pemeliharaan dan Monitoring Berkala Aplikasi e-Performance, yang meliputi:

- a. Pemantauan kinerja system;
- b. Perbaikan bug dan masalah teknis;
- c. Keamanan sistem;
- d. Backup dan pemulihan data;
- e. Optimalisasi dan perawatan database;
- f. Pemeliharaan infrastruktur, server dan hardware lainnya;
- g. Pelaporan dan analisis.

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Pada **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**, mengalami kenaikan anggaran yang semula sebesar **Rp.1,762,249,400,00** menjadi **Rp.2,373,528,300,00**. Pada sub kegiatan ini mendapat penambahan anggaran sebesar Rp.612.790.000,00 digunakan untuk untuk biaya kontribusi Pelatihan Dasar (Latsar) sebanyak 116 orang CPNS dengan biaya kontribusi setiap peserta sebesar Rp.5.260.000,00.

b) Pergeseran anggaran antar Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Pada **Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional**, mendapat penambahan anggaran dari pergeseran anggaran pada **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan** sebesar Rp.1.511.100,00. Penambahan anggaran ini akan digunakan untuk biaya operasional kegiatan pemberian izin tugas belajar dan pencantuman gelar bagi PNS.

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Pada **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.1.511.100,00 untuk dilakukan pergeseran ke **Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional**.

c) Usulan penambahan kebutuhan anggaran kegiatan prioritas yang belum terakomodir pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Disamping kegiatan tersebut di atas yang telah mendapat penambahan ataupun pergeseran anggaran, masih terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran, namun **belum terakomodir** pada perubahan RKPD tahun 2025, di antaranya sebagai berikut:

- 1) **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**, membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,978,428,300.00 yang akan digunakan untuk biaya kontribusi pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) serta biaya kontribusi pelatihan dasar (Latsar) CPNS formasi tahun 2024. Namun dari anggaran yang tersedia untuk pengiriman Latsar CPNS sebanyak 509 orang dengan biaya kontribusi sebesar Rp.5.260.000,00 masih belum

mengakomodir seluruh peserta. Anggaran yang telah terakomodir pada perubahan RKPD tahun 2025, hanya untuk biaya kontribusi 394 peserta Latsar CPNS yaitu sebesar Rp.2.072.440.000,00, sedangkan masih terdapat 115 orang CPNS yang belum terakomodir pada DPA tahun 2025, sehingga membutuhkan penambahan biaya kontribusi Latsar sebesar 115 orang CPNS x Rp.5.260.000,- = Rp.604.900.000,00.

- 2) **Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00, namun anggaran yang tersedia pada DPA hanya sebesar Rp.48.650.000,00 dan telah mendapat penambahan sebesar Rp.50.000.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut masih belum mencukupi untuk kegiatan pengelolaan kinerja ASN Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menggunakan aplikasi E-Performance dan aplikasi E-Kinerja dari BKN, sehingga dibutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp.101.350.000,00 untuk optimalisasi dan pengembangan aplikasi pengelolaan kinerja ASN sebagai berikut:
 - a. Pengembangan fitur laporan disiplin dan kinerja berdasarkan Kepmendagri Nomor 900-4700 tahun 2020;
 - b. Pengembangan Aplikasi E-Performance sebagai alat ukur/evaluasi kinerja organisasi Perangkat Daerah (Interoperabilitas dengan aplikasi E-Kinerja BKN).

d) **Anggaran BKPSDM Kabupaten Lamongan setelah Perubahan**

Dari penambahan dan pergeseran antar Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut terjadi perubahan anggaran BKPSDM Kabupaten Lamongan di tahun 2025 ini yang semula sebesar Rp.9.554.529.100,00 menjadi Rp.10.217.319.100,00 sehingga total penambahan pagu sebesar Rp.662.789.999,72 atau meningkat 6.94%. Perubahan besaran pagu tersebut, dapat diuraikan bahwa pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** dari pagu anggaran sebesar Rp.6.341.353.000,00 berkurang sebesar Rp.99.973.952 sehingga menjadi Rp. 6,548,575,500.28 atau mengalami penurunan sebesar Rp.0,28, sedangkan **Program Kepegawain Daerah** dari pagu anggaran sebesar Rp.678.704.200,00 menjadi Rp.728.704.200,00, karena mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 atau 7.37%. Sementara itu **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia** dari anggaran sebesar Rp.2.327.249.400,00 mendapat penambahan anggaran sebesar Rp.612.790.000,00 untuk biaya kontribusi pelatihan dasar CPNS sebanyak 116

orang, sehingga pagu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Rp.2.940.039.400,00.

Adapun rumusan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025.

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	CATATAN PENTING
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			11,489,612,880.00				10,217,319,100.00			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			11,489,612,880.00				10,217,319,100.00			
5.03	KEPEGAWAIAN			7,343,370,880.00	KEPEGAWAIAN			7,277,279,700.00			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	89.18	6,383,370,880.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	89.18	6,548,575,500.00	165,204,620.00		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu	100%	30,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu	100%	25,000,000.00	-5,000,000.00		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7,880,000.00	-2,120,000.00		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	17,120,000.00	-2,880,000.00		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	5,717,071,040.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	5,997,018,660.00	279,947,620.00		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5,697,071,040.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5,978,768,660.00	281,697,620.00		
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	7,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	7,500,000.00	0.00		
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	12,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	10,750,000.00	-1,750,000.00		

KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	CATATAN PENTING
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan baik	100%	1,500,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan baik	0%	0.00	-1,500,000.00		
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1,500,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0.00	-1,500,000.00		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tercukupi dengan baik	100%	94,580,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tercukupi dengan baik	100%	110,816,400.00	16,236,400.00		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62 Paket	2,500,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62 Paket	2,500,000.00	0.00		
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah alat-alat rumah tangga yang tersedia	269 Paket	10,000,000.00	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah alat-alat rumah tangga yang tersedia	269 Paket	10,000,000.00	0.00		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	769 Paket	26,462,900.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	769 Paket	20,519,400.00	-5,943,500.00		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3782 Paket	10,143,700.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3782 Paket	4,866,000.00	-5,277,700.00		
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	78 Dokumen	15,486,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	78 Dokumen	22,038,800.00	6,552,800.00		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	29,987,400.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	50,892,200.00	20,904,800.00		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi dalam tahun berjalan	100%	48,595,200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi dalam tahun berjalan	0%	17,942,200	-30,653,000.00		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	48,595,200.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	17,942,200.00	-30,653,000.00		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	373,422,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	280,422,000.00	-93,000,000.00		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000.00	0.00		

KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	CATATAN PENTING
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	363,422,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	270,422,000.00	-93,000,000.00		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	85%	118,202,640.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	85%	117,376,240.00	-826,400.00		
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	72,343,600.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,440,700.00	-41,902,900.00		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	32,939,040.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	37,015,540.00	4,076,500.00		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	9,920,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	9,920,000.00	0.00		
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,000,000.00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40,000,000.00	37,000,000.00		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	82.25	960,000,000.00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	82.25	728,704,200.00	-231,295,800.00		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data ASN yang valid	100%	540,000,000.00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data ASN yang valid	100%	262,808,000.00	-277,192,000.00		
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	10,000,000.00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	4,700,000.00	-5,300,000.00		
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	400,000,000.00	Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	182,943,000.00	-217,057,000.00		
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	10,000,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	8,550,000.00	-1,450,000.00		
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	73 Lembaga	10,000,000.00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	73 Lembaga	10,000,000.00	0.00		
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	110,000,000.00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	56,615,000.00	-53,385,000.00		

KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	CATATAN PENTING
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi jabatan	87%	280,000,000.00	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi jabatan	87%	296,083,200.00	16,083,200.00		
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	22,000,000.00	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	18,934,700.00	-3,065,300.00		
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	20,000,000.00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	16,750,000.00	-3,250,000.00		
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	238,000,000.00	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	260,398,500.00	22,398,500.00		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang terfasilitasi dalam jabatan fungsional	100%	100,000,000.00	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang terfasilitasi dalam jabatan fungsional	100%	27,663,000.00	-72,337,000.00		
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	1.942 Orang	100,000,000.00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250 Orang	27,663,000.00	-72,337,000.00		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang prestasi kerjanya baik	98%	40,000,000.00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang prestasi kerjanya baik	98%	142,150,000.00	102,150,000.00		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	10,000,000.00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	98,650,000.00	88,650,000.00	Penambahan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 digunakan untuk pemeliharaan dan monitoring berkala aplikasi E-Performance untuk optimalisasi dan keamanan sistem.	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	65 Orang	10,000,000.00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	65 Orang	10,000,000.00	0.00		
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	74 Orang	10,000,000.00	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	74 Orang	23,500,000.00	13,500,000.00		
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	4 Dokumen	10,000,000.00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	4 Dokumen	10,000,000.00	0.00		

KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	CATATAN PENTING
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			4,146,242,000.00				2,940,039,400.00			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	28.44	4,146,242,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	28.44	2,940,039,400.00	-1,206,202,600.00		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan nilai post test baik	79%	455,000,000.00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan nilai post test baik	79%	450,000,000.00	-5,000,000.00		
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160 Orang	455,000,000.00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160 Orang	450,000,000.00	-5,000,000.00		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikasi kompetensi / keahlian	2.241 ASN	3,691,242,000.00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan sertifikasi kompetensi / keahlian	2.241 ASN	2,490,039,400.00	-1,201,202,600.00		
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional yang Disusun	4 Dokumen	72,000,000.00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional yang Disusun	4 Dokumen	116,511,100.00	44,511,100.00	Pergeseran penambahan anggaran dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, sebesar Rp.1.511.100,- untuk biaya operasional kegiatan izin tugas belajar dan pencantuman gelar.	

KODE	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	CATATAN PENTING
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	3.619.242.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	2.373.528.300,00	-1.245.713.700,00	- Penambahan anggaran sebesar Rp.612.790.000,- untuk biaya kontribusi Pelatihan Dasar (Latsar) sebanyak 116 orang CPNS @ Rp 5.260.000,-; - Kuota Diklat Pim III/ PKA dari BPSDM Provinsi Jatim hanya 6 orang, sementara di DPA menganggarkan 7 orang, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp.23.480.000,-, akan dialihkan untuk kontribusi pengiriman Latsar sebesar Rp.21.968.900,-, dan sisanya sebesar Rp.1.511.100,- akan digeser ke Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional.	Sesuai Peraturan LAN No. 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, "Masa prajabatan dilaksanakan selama satu tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS." Sementara itu jumlah CPNS yang wajib mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar)/ Prajabatan sebanyak 509 CPNS terdiri dari 8 CPNS (formasi Sekolah Kedinasan) dan 501 CPNS formasi tahun 2024. Biaya kontribusi setiap peserta Latsar tahun 2025 sebesar @Rp.5.260.000,- x 509 orang = Rp.2.871.960.000,-, sedangkan anggaran yang terakomodir pada Perubahan Renja 2025 hanya untuk kontribusi 394 CPNS yaitu sebesar Rp.2.072.440.000,-. Sementara itu masih terdapat 115 CPNS dengan biaya kontribusi Rp.604.900.000,- yang belum terakomodir pada Perubahan Renja 2025.

Lamongan, Juni 2025
Kep. De Betan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan
Drs. Sidiqul M. P.d.
Pemula Utama Muda
NIP.19661019/1987031008



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lamongan tahun 2025 merupakan perubahan atas Rencana Kerja tahunan BKPSDM Kabupaten Lamongan yang mengacu pada perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2025. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Lamongan tahun 2025 akan menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) selanjutnya akan dijadikan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kinerja (Renja) BKPSDM Kabupaten Lamongan tahun 2025 ini, maka telah tersedia dokumen perencanaan tahunan yang telah disempurnakan dari Renja sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi capaian triwulan I tahun 2025 dan menjadi dasar rumusan perubahan anggaran tahun 2025 serta pedoman operasional bagi seluruh Pejabat dan Pelaksana di lingkungan BKPSDM Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Renja ini merupakan tolak ukur yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Lamongan tahun 2025. Renja ini juga merupakan dokumen penjamin arah tercapainya tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Lamongan untuk periode tahun 2025, serta untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Output Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lamongan adalah hasil pencapaian tujuan, sasaran dan terlaksananya program/ kegiatan tahunan dengan baik sesuai dengan target serta tugas dan fungsi yang diampuh.

4.2 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sebagai langkah antisipatif dalam hal ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 BKPSDM Kabupaten Lamongan secara umum telah tercapai dengan baik didukung pelaksanaan program dan kegiatan, namun terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan penambahan anggaran dan pergeseran kode rekening belanja baik di dalam satu kegiatan maupun antar kegiatan lainnya, hal ini disebabkan karena adanya kekurangan anggaran pada sub kegiatan

tertentu yang bersifat mendesak untuk segera dilaksanakan serta adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan penyesuaian kode rekening belanja.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang membutuhkan penambahan atau pergeseran anggaran yaitu:

a. Kegiatan/ Sub Kegiatan yang membutuhkan penambahan anggaran

1. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pada sub kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, mengalami kenaikan anggaran yang semula sebesar **Rp.50.650.000,00** menjadi **Rp.98.650.000,00**. Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,00 digunakan untuk pemeliharaan dan monitoring secara berkala serta optimalisasi dan keamanan aplikasi E-Performance.

2. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pada sub kegiatan **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**, mengalami kenaikan anggaran yang semula sebesar **Rp.1.762.249.400,00** menjadi **Rp.2.375.039.400,00**. Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.612.790.000,00 digunakan untuk biaya kontribusi pengiriman peserta pelatihan dasar CPNS.

b. Pergeseran anggaran antar Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Pada **Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional**, mendapat penambahan anggaran dari pergeseran anggaran pada **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan** sebesar Rp.1.511.100,00. Penambahan anggaran ini akan digunakan untuk biaya operasional kegiatan pemberian izin tugas belajar dan pencantuman gelar bagi PNS.

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Pada **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp.1.511.100,00 untuk dilakukan pergeseran ke **Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional**.

4.3 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a) Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b) Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
- 2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.4 Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan Tahun 2025, dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Sementara (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan,

2025

**Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan**



Drs. Sholahudin, M.Pd.

Pemangku Muda

NIP. 19601019 198703 1 008